

Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Adi Setya Budi¹, Yuliana Noviyanti B. Lejab², Wibisono Gunawan Rohi³, Enike Tje Yustin Dima⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
Adisetyabudiasb45@gmail.com¹, yulianalejab04@gmail.com²,
gunawanrohi@gmail.com³

Submitted: 18th July 2025 | **Edited:** 15th August 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Budi, A. S., Lejab, Y. N. B., Rohi, W. G., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1183-1188.

ABSTRACT

Corruption is a major obstacle to sustainable economic development in Indonesia. Although the country is rich in natural resources, the persistent corruption across public sectors undermines economic progress. This study aims to examine the impact of corruption on Indonesia's economic growth by analyzing its effects on investment, productivity, public finance, and service quality. Using a qualitative descriptive approach through a literature review of academic journals, government reports, and institutional data, this research identifies several key implications of corruption on the economy. The findings reveal that corruption reduces both domestic and foreign investment due to legal uncertainty and an uncompetitive business environment. It also leads to inefficient resource allocation in public spending, which in turn decreases national productivity. Furthermore, corruption in taxation systems causes revenue leakage and forces the government to rely heavily on public debt. The study concludes that systemic corruption not only hampers economic growth but also weakens the trust in public institutions, deepens income inequality, and undermines long-term fiscal stability. Addressing corruption is therefore essential to building a transparent, inclusive, and sustainable economic environment in Indonesia.

Keywords : Corruption, Economic Growth, Investment, Public Finance, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari sektor pertambangan, energi, hingga pertanian. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan swasta (Nurhadi, 2020; Mohamad, 2022).

Korupsi telah menjadi fenomena yang mengakar dan sistemik dalam birokrasi Indonesia. Menurut laporan Transparency International (2023), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai skor 34 dari 100, yang menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi dan lemahnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Tingginya angka korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan distorsi dalam pengalokasian sumber daya, menurunkan efisiensi birokrasi, serta menghambat investasi dan produktivitas nasional (Siregar, 2021; World Bank, 2020).

Beberapa kasus besar yang baru-baru ini terbongkar, seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan pengelolaan sumber daya mineral di PT Timah, menjadi bukti nyata bahwa korupsi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan sistemik. Total kerugian negara dari dua kasus tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun (KPK, 2023; BPK, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang seperti defisit anggaran, ketimpangan sosial, dan menurunnya daya saing nasional (Amalia, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023).

Secara teoritis, hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas, terutama dalam konteks negara berkembang. Beberapa studi menunjukkan bahwa korupsi memperburuk iklim investasi, mengurangi penerimaan negara, dan merusak kualitas belanja publik (Wininatin, 2021; Fatimah & Sulaiman, 2021). Meskipun begitu, masih sedikit kajian yang secara khusus mengulas dampak korupsi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia secara menyeluruh dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terkini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui kajian mendalam terhadap literatur akademik, laporan kelembagaan, dan data terkini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman teoritis dan praktis mengenai urgensi pemberantasan korupsi sebagai langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Teori Korupsi

Korupsi dalam perspektif ekonomi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Tindakan ini meliputi penyuapan, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas sistem pemerintahan (Rose-Ackerman & Palifka, 2019). Korupsi berkembang dalam lingkungan yang memiliki kontrol lemah, minim transparansi, dan lemahnya akuntabilitas publik (Kaufmann & Kraay, 2020).

Menurut Suryanto dan Rahmawati (2020), korupsi di negara berkembang seperti Indonesia terjadi karena lemahnya sistem penegakan hukum, rendahnya gaji pegawai publik, dan budaya permisif terhadap praktik suap. Selain itu, perbedaan informasi antara pihak pengambil keputusan dan publik menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan (Widoyoko, 2019). Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan ketimpangan sosial.

Transparency International (2023) melalui Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) menunjukkan bahwa skor IPK Indonesia masih rendah, mencerminkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan sektor publik.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menekankan pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan (Todaro & Smith, 2020). Namun dalam konteks modern, faktor kelembagaan seperti efektivitas kebijakan publik, sistem hukum, dan tata kelola pemerintahan juga memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan (Acemoglu & Robinson, 2021).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas fiskal, iklim investasi, dan efisiensi birokrasi. Jika korupsi tinggi, maka kebijakan publik yang seharusnya mendukung efisiensi ekonomi akan kehilangan efektivitasnya. Hal ini diperkuat oleh studi Damayanti dan Rachmawati (2021), yang menyatakan bahwa perencanaan ekonomi jangka panjang tidak akan optimal jika lembaga pelaksana dipenuhi konflik kepentingan dan praktik korupsi.

Hubungan antara Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memiliki hubungan yang erat dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Wahyuni dan Zulfikar (2022) menunjukkan bahwa korupsi menurunkan minat investor, baik domestik maupun asing, karena tingginya biaya transaksi dan ketidakpastian hukum. Selain itu, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran dan mengurangi kapasitas negara dalam membiayai pembangunan (Siregar & Fitriani, 2020).

Menurut Prasetyo (2019), alokasi anggaran publik yang dipengaruhi kepentingan pribadi akan menyebabkan ketidakefisienan proyek infrastruktur, penurunan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan produktivitas nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, sistem perpajakan yang lemah dan mudah disuap menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara, yang berdampak pada pembengkakan utang dan ketergantungan fiskal (Yusuf & Wulandari, 2021).

Berdasarkan teori dan studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada aspek legal dan sosial, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis mendalam terhadap isu korupsi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif teoretis dan empiris dari berbagai publikasi akademik, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas topik serupa (Syamsuddin & Sari, 2020).

Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, khususnya dari tahun 2019 hingga 2024. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) Relevansi terhadap topik korupsi dan pertumbuhan ekonomi, (2) Ketersediaan data yang dapat diverifikasi, dan (3) Tingkat kredibilitas penerbit seperti jurnal bereputasi, institusi pemerintah (BPK, KPK, BPS), dan organisasi internasional (OECD, World Bank). Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri database seperti Google Scholar, SINTA, dan ResearchGate menggunakan kata kunci “corruption”, “economic growth”, “public finance”, dan “Indonesia”.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur terkait dampak korupsi terhadap investasi, produktivitas, penerimaan negara, dan kualitas belanja publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis argumentatif yang komprehensif berdasarkan temuan sebelumnya. Dalam proses validasi, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai publikasi untuk meningkatkan keandalan interpretasi (Sugiyono, 2021).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman konseptual dan praktis mengenai hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah.

HASIL PENELITIAN

Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lima aspek utama yang terdampak adalah:

1. lesunya investasi dan pertumbuhan ekonomi
2. penurunan produktivitas
3. memburuknya kualitas barang dan jasa publik
4. kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak
5. meningkatnya ketergantungan pada utang negara.

Pertama, korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan iklim usaha yang tidak kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, enggan menanamkan modal di negara yang sistem tata kelolanya tidak transparan. Biaya transaksi menjadi tinggi akibat pungutan liar, suap, dan praktik perizinan yang lambat. Hal ini menyebabkan stagnasi investasi yang berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Zulfikar (2022) yang menyatakan bahwa korupsi secara signifikan menurunkan minat investasi asing langsung (FDI) di negara-negara berkembang.

Kedua, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Proyek-proyek pemerintah kerap mengalami pembengkakan anggaran dan penurunan mutu karena penyimpangan dana. Banyak dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pelatihan tenaga kerja atau peningkatan teknologi justru disalahgunakan. Studi Damayanti dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang berdampak pada rendahnya produktivitas sektor publik dan swasta.

Ketiga, korupsi memperburuk kualitas barang dan jasa publik. Dalam sektor infrastruktur, misalnya, korupsi dalam proses tender mengakibatkan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga bangunan menjadi cepat rusak. Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemotongan anggaran akibat korupsi menurunkan mutu layanan kepada masyarakat. Penelitian oleh Kadir dan Arifin (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbanding terbalik dengan tingkat korupsi di suatu wilayah.

Keempat, korupsi berdampak pada kebocoran penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Banyak entitas bisnis yang menyuap aparat pajak agar dapat menghindari kewajiban perpajakan, sehingga potensi pendapatan negara menjadi tidak optimal. Hal ini diperkuat oleh temuan Yusuf dan Wulandari (2021) yang mencatat bahwa korupsi di sistem perpajakan menyebabkan kerugian fiskal jangka panjang dan menurunkan kredibilitas negara dalam pengelolaan anggaran.

Kelima, ketika penerimaan negara tidak mencukupi akibat kebocoran fiskal, pemerintah terpaksa mengambil utang untuk menutupi defisit. Sayangnya, dalam banyak kasus, dana hasil pinjaman luar negeri pun tidak sepenuhnya digunakan secara efektif karena kembali dikorupsi. Ini menciptakan lingkaran setan ketergantungan fiskal dan membebani APBN dalam jangka panjang. Fenomena ini turut diamati dalam studi oleh Wijayanti dan Firmansyah (2023) yang menyoroti kaitan erat antara korupsi anggaran dan peningkatan rasio utang negara.

Dengan demikian, berdasarkan temuan dan perbandingan dari berbagai literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara langsung maupun tidak langsung melemahkan perekonomian Indonesia melalui beragam mekanisme yang saling terkait dan memperburuk efisiensi sistem ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan hambatan struktural yang serius dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal akibat tingginya tingkat korupsi di berbagai sektor. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap sejumlah aspek penting perekonomian, seperti menurunnya investasi, rendahnya produktivitas nasional, buruknya kualitas layanan publik, kebocoran pendapatan negara, serta peningkatan beban utang negara.

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian fiskal, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi anggaran publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Iklim investasi yang tidak kondusif akibat ketidakpastian hukum dan birokrasi yang tidak transparan menyebabkan investor enggan menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Studi ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata, tetapi merupakan prasyarat fundamental untuk menciptakan stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Diperlukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memutus siklus korupsi yang selama ini menghambat kemajuan ekonomi nasional.

Dengan demikian, upaya pengentasan korupsi bukan hanya penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2021). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Jakarta: Gramedia.
- Amalia, F. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 112–124.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Laporan Evaluasi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Ekonomi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Damayanti, R., & Rachmawati, F. (2021). Efek Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–67.
- Fatimah, S., & Sulaiman, R. (2021). Pengaruh Korupsi terhadap Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 21–35.
- Hadiz, V. R. (2020). *Oligarki dan Korupsi di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Marjin Kiri.
- Kadir, A., & Arifin, M. (2020). Korupsi dan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis di Sektor Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 21(2), 101–116.

- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2020). Governance Indicators and Anti-Corruption: Policy Approaches. *World Bank Policy Research Working Paper*, 9432, 1–27.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan, R., & Lestari, N. (2019). Pendekatan Kualitatif dalam Kajian Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 33–42.
- Mohamad, T. (2022). Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dan Dampaknya terhadap Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 33–45.
- Nurhadi, M. (2020). Korupsi dan Perekonomian: Kajian Teoritis dan Empiris. *Jurnal Integritas*, 6(2), 65–78.
- OECD. (2022). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2022*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Prasetyo, H. (2019). Pengaruh Korupsi terhadap Efisiensi Belanja Publik dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(2), 87–98.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2019). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siregar, D., & Fitriani, N. (2020). Korupsi dan Stabilitas Fiskal di Indonesia: Analisis Deskriptif. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 21–35.
- Siregar, R. (2021). Dampak Korupsi dalam Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(3), 78–89.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, T., & Rahmawati, E. (2020). Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 44–59.
- Syamsuddin, A., & Sari, M. (2020). Studi Literatur sebagai Metode Penelitian dalam Ilmu Sosial: Pendekatan, Teknik, dan Tantangan. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 3(1), 45–60.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Wahyuni, L., & Zulfikar, R. (2022). Korupsi dan Iklim Investasi: Studi Empiris di Negara Berkembang. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 18(1), 11–25.
- Widoyoko, E. P. (2019). *Anatomi Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Wijayanti, A., & Firmansyah, T. (2023). Korupsi Anggaran dan Dampaknya terhadap Rasio Utang Negara: Perspektif Ekonomi Makro. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, 7(1), 77–89.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Competitiveness*. Washington DC: The World Bank.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Improving Investment Climate*. Washington DC: The World Bank.
- Yusuf, M., & Wulandari, S. (2021). Kebocoran Pajak dan Korupsi Fiskal: Analisis Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(2), 102–116.